

Relasi Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Pilkada di Mojokerto

Galih Satria Utomo

NIM: 070710144

Mahasiswa S I Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRAK

Penelitian tentang pemilihan kepala daerah sudah banyak dilakukan, namun seringkali penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang strategi kemenangan. Di sini peneliti lebih tertarik pada relasi kekuatan pada calon kepala daerah dan juga pada partai politik pendukungnya. Dimana banyak sekali relasi kuasa yang berpengaruh pada Pilkada di Mojokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil anggota partai pendukung calon kepala daerah, KPUD Mojokerto dan beberapa narasumber dari organisasi masyarakat sebagai objek penelitian. Relasi kekuatan-kekuatan ini kemudian menimbulkan interaksi dan dampak terhadap masyarakat pada pemilihan kepala daerah.

Pada penelitian ini juga dijelaskan bagaimana peran partai politik pendukung calon kepala daerah dalam memberikan partisipasi dukungan kepada calon kepala daerah. Relasi kuasa pada Pilkada Mojokerto tidak jauh-jauh dari peran incumbent yang masih tetap ikut berkontestasi pada Pilkada, hal ini jelas memiliki relasi kuasa yang cukup kuat.

Kata kunci : Relasi, Kekuatan Politik Lokal, Pilkada

ABSTRACT

Research on local elections has been done, but these studies often focus more talking about winning strategies. Here, researchers are more interested in the power relations at regional head candidates and political party supporters. Where a lot of power relations influence the elections in Mojokerto.

This research is a qualitative study that took party members supporting regional head candidates, the Election Commission Mojokerto and several speakers from community organizations as an object of research. The relation of these forces then cause the interaction and impact on society at local elections.

In this study also described how the role of political parties supporting regional head candidates in providing support to the participation of regional head candidates. Mojokerto power relations in the elections not far away from the role of the incumbent that still remain in the areas of contestation in the elections, it clearly has the power relations that are strong enough.

Keywords: Relationships, The Power of Local Politics, Election

Latar belakang masalah

Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politknasional, yang merupakan salahsatu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah cara baru yang bermakna bagi proses konsolidasi/penggabungan demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkatlokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku system demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi.Sudah tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada wargadibandingkan pada segelitir elite di DPRD.

Akan tetapi Pilkada tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang diharapkan.Pelaksanaan Pilkada di JawaTimur menjadi salah satu sejarah bagi proses demokratisasi lokal di Indonesia. Proses Pilkada pertama kali di JawaTimur berlangsung dengan banyak masalah tetapi masalah tersebut idak menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan dan politik lokal di JawaTimur. Masalah tersebut justru diselesaikan melalui jalan hukum yang sah dan sesuai dengan hakikat demokrasi. Pembahasan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikotayang demokratis dan berkualitas, seharunya dikaitkan tidak denganpemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan aspek-aspek etika, sosial serta budaya.Semuapihak-pihak yang ikutan dil dalam pelaksanaan Pilkada, harusmemahamidanmelaksanakanseluruhperaturanperundangan yang berlakusecara konsisten.PadadasarnyaPilkadalangsungadalahmemilihKepala Daerah yang profesional, legitimasi, dandemokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).SelayaknyaPilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.

Di era orde baru kondisi dan dinamika politik lokal sering terjadi, hal ini dapat dijelaskan dalam tiga hal,kontrol di tingkat penyelenggara negara sudah berjalan, rakyat memilih wakil rakyat(DPR), DPR kemudian memilih capres dan cawapres, lalu rakyat

kembali memilih presiden dan wakil presiden. Namun berbeda dengan halnya kondisi di daerah bisa di katakan seperti jaman orde baru. Kondisi perpolitikan di daerah selalu di buat sama seperti periode sebelumnya, hal ini bukan untuk kepentingan kepala daerah saja melainkan hampir semua pegawai pemerintah daerah yang sudah ada di zona nyaman mereka. Hal seperti inilah yang menjadi banyak Pilkada, calon incumbent atau calon yang di dukung incumbent selalu memenangi Pilkada dan untuk mempertahankan kekuasaan ini tentunya calon incumbent memanfaatkan segala potensi di dalam pemerintahan. Hal ini terbukti bahwa dari beberapa kali Pilkada yang diselenggarakan, terbukti bahwa kekuatan incumbent (status quo) selalu memenangkan Pilkada terutama di kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto dan provinsi Jawa Timur. Di dalam hal ini, status quo jelas sekali menjadi bentuk kekuasaan yang sangat mutlak, namun bentuk mempertahankan kekuasaan tidak selalu pada calon incumbent melainkan bisa dilanjutkan ke kerabat atau kroni dari kepala daerah yang lama. Pilkada langsung digulirkan dengan suatu keyakinan kuat baik dari para akademisi maupun politisi bahwa proyek besar demokratisasi di negeri ini harus didukung oleh demokratisasi di tingkat lokal. Untuk itu Pilkada secara langsung adalah jawaban dari kebutuhan untuk mempercepat demokratisasi di tingkat lokal. Peningkatan kualitas demokrasi di daerah, dianggap akan turut mendorong kemajuan demokratisasi di tingkat nasional. Kekuatan incumbent itu juga sudah terbukti pada Pilkada Mojokerto 2006, hal ini terbukti pada pasangan Achmady-Suwandi :

SURABAYA (Suara Karya): Seperti sudah diduga sebelumnya, bupati lama Mojokerto Achmady yang berpasangan dengan Suwandi berhasil mendulang suara terbanyak dalam Pilkada Mojokerto yang diselenggarakan Rabu (24/8) kemarin (2005). Tidak tanggung-tanggung, pasangan yang berada di nomor urut 2 ini menghimpun 17.582 suara atau 88,75 persen dari total suara yang diperoleh hingga pukul 17.00 WIB kemarin. Informasi yang dihimpun Suara Karya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mojokerto hingga sore kemarin, pasangan yang lain kalah jauh dari perolehan angka itu. Pasangan Iwan-Linda yang berada di nomor urut 1 misalnya, kemarin hanya menghimpun 12.567 atau 6,34 persen suara saja. Tetapi kondisi ini masih lebih bagus dibanding pasangan RM Boedi-Endang Widayati yang hanya meraup 9.727 atau 4,91 persen suara saja. Dukungan pada pasangan ini ternyata bukan hanya muncul dari warga Mojokerto. Buktinya, Walikota Mojokerto dan Bupati Jombang menyempatkan diri datang untuk memberi dukungan saat hari H pencoblosan kemarin.

Kedua pejabat dari daerah lain itu sengaja datang ke Rumah Dinas Bupati Mojokerto. Achmady sendiri melakukan pencoblosan di TPS 2 Kelurahan Kemasan Tani Kecamatan Gondang. Selain perolehan suara sah tersebut, data yang ada di KPU Mojokerto kemarin juga menyebutkan tentang jumlah suara tidak sah yang hanya 19.750 suara. Angka ini jauh lebih rendah dibanding jumlah suara sah yang mencapai 211.183 suara. Menurut Ketua KPU Mojokerto, Didik Hendra Puspita, perolehan suara itu baru didapat dari 667 TPS. Padahal jumlah TPS di 18 kecamatan Mojokerto mencapai 1.579 TPS. "Kita masih terus menunggu hasil perhitungan ini," ujarnya. Yang membanggakan, kata dia, antusiasme warga Mojokerto untuk mengikuti Pilkada sangat besar. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang menyempatkan diri datang ke lokasi pencoblosan. Sejumlah TPS bahkan ada yang membagi doorprize untuk menarik minat pemilih suara.

Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui Pilkada, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan pembenaran (legitimasi) kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui Pilkada perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah. Pilkada langsung adalah pemenuhan prinsip demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik melalui hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik (kepala pemerintahan/kepala daerah). Sesuai dengan asas pemilihan umum di dalam konstitusi/undang-undang dasar, maka undang-undang harus memastikan bahwa pemenuhan partisipasi masyarakat tersebut harus berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semangat dilaksanakannya Pilkada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan Pilkada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pilkada langsung adalah: *Pertama*, Pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. *Kedua*, Pilkada diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, Pilkada akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah/daerah. Pilkada langsung merupakan ekspresi paling nyata dari kedaulatan rakyat sehingga rakyat (khususnya di daerah) tidak hanya menjadi penonton tapi ikut menentukan masa depan mereka dan daerah mereka.

Berdasarkan evaluasi hasil Pilkada, sistem pemilihan ternyata belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dalam menggerakkan roda pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini terjadi karena sistem pemilihan belum mendorong terwujudnya kepala daerah yang benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin daerah. Suatu seleksi pejabat publik hendaknya mempertimbangkan kualifikasi yang objektif berdasarkan aspirasi ideal yang ada di dalam masyarakat. Apalagi untuk sebuah jabatan kepala daerah yang akan menentukan maju mundurnya suatu daerah hendaknya dipilih dari mereka yang

memiliki kualifikasi ideal dari segi moral, etika, pendidikan, dan kemampuannya. Kualitas calon terpilih juga terkait erat dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kapasitas dan kemampuan (kapabilitas) calon kepala daerah. Dalam konteks ini, model kampanye menjadi penting untuk diperhatikan.

Hal ini akan terpenuhi jika ada ruang dialog terhadap visi, misi, dan program yang disampaikan oleh kandidat. Model kampanye sendiri belum mampu melakukan pendidikan kepada masyarakat yaitu dengan kampanye yang benar-benar mampu menunjukkan kapasitas dan kapabilitas calon. Masyarakat terbukti belum melakukan pilihan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah yang terukur dari visi, misi, dan program mereka. Sebaliknya lebih kuat menjatuhkan pilihan atas dasar alasan primordial atau bahkan semata-mata alasan materi. Syarat ini dinilai menyimpan kelemahan dilihat dari rendahnya daya dukung pemilih (masyarakat) terhadap kepala daerah terpilih.

Dalam konteks lokal ini menggunakan desentralisasi politik, Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau perwakilan yang terpilih lebih banyak kekuasaan dalam pembuatan keputusan publik. Hal ini sering dikaitkan dengan politik pluralistik dan pemerintahan yang representatif, tetapi juga dapat mendukung demokratisasi dengan memberikan warga negara, atau perwakilan mereka, pengaruh yang lebih dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Banyak kasus di beberapa daerah, penentuan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) ditentukan berdasarkan politik transaksional. Permasalahan yang sering terjadi setiap menjelang pelaksanaan Pemilu, calon kepala daerah selalu dimanfaatkan oleh beberapa elit partai politik dengan persyaratan bahwa siapa yang bisa memberikan keuntungan secara finansial paling besar, dialah yang paling mungkin akan diusung partai politik. Sementara kemampuan manajerial (yang berhubungan dengan kepemimpinan) dan visioner di nomor duakan. Intinya, hanya calon kepala daerah yang memiliki finansial besar yang akan dipilih oleh partai politik. Di sinilah politik transaksional berkembang. Politik yang dijadikan lahan bisnis para elit partai politik. Setiap proses pelaksanaan pemilu, biaya yang dikeluarkan bagi penyelenggara ataupun kontestan (calon kepala daerah) semakin membesar. Pendidikan politik dan demokratisasi untuk meningkatkan kesadaran rakyat terhambat. Kondisi ini yang membuat sikap pragmatisme rakyat setiap Pemilu semakin membesar.

Politik lokal bukanlah semata-mata merupakan desain 'netral' untuk membawa demokrasi ketingkat lokal seperti yang dipercayai para teoritis kelompok neoliberal/neoinstitusional. Politik lokal merupakan sebuah arena kontestasi bagi pelbagai

kepentingan ekonomi dan politik untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya akan didistribusikan.

Fenomena baru dalam undang-undang pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, artinya bahwa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 56 undang-undang Pemerintahan daerah). Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selain itu pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, demikian juga dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam implementasi pemerintah daerah, negara masih mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan negara juga masih mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah yang di laksanakan di kota Mojokerto merupakan bentuk implementasi atau pelaksanaan tentang otonomi daerah dan demokratisasi yang dimana terdapat bentuk pemindahan tanggung jawab wewenang dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke level pemerintah daerah untuk membawa pengaruh perubahan terhadap politik . Para calon kepala daerah pun membentuk tim sukses dan melakukan segala cara agar memperoleh kemenangan, serta bagaimana dampak yang terjadi oleh interaksi antar kekuatan politik terhadap integrasi massa dalam proses pemilihan kepala daerah.

Kemudian fenomena yang dapat dikaji pada Pemilukada di Mojokerto adalah maraknya aksi anarkhis yang mengiringi Pemilukada 2010. Banyak yang berkomentar bahwa sebagian dari aksi-aksi tersebut sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai aksi biasa, dan lebih menyerupai “amuk massa”. Anarkhisme, amuk massa, ataupun istilah-istilah lainnya yang sepadan, adalah suatu bentuk untuk menggambarkan munculnya aksi massa yang membabi-butakan dengan disertai tindakan kekerasan dan perusakan. Faktor sosial-politik,

seperti berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah, serta keadilan hukum yang lebih berpihak kepada kaum elit, pada gilirannya melahirkan krisis kepercayaan di masyarakat. Pada saat yang sama, masalah kemiskinan terus membelit rakyat kecil dan tak kunjung teratasi: biaya hidup sehari-hari terus melejit, harga kebutuhan pokok semakin tak terjangkau, dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Semua itu memberikan andil dalam membentuk watak dan kepribadian masyarakat yang keras dan mudah terbakar. Faktor kultural turut memainkan peran. Karakteristik kultural antara satu daerah dengan daerah lain memang tidak homogen. Karena itu muncullah istilah masyarakat “bersumbu pendek” untuk mengilustrasikan karakteristik masyarakat yang mudah naik pitam, dan masyarakat “bersumbu panjang” untuk mendefinisikan masyarakat yang lebih santun dan penyabar.

Problem sosial-politik memberikan kontribusi penting, dan akumulasi persoalan menjadi kian akut dan kronis. Orang mudah putus-asa, karena hidup seolah tanpa masa depan, tanpa kepastian, dan satu-satunya kepastian yang mereka sadari adalah ketidakpastian itu sendiri. Banyak yang beranggapan, jangan-jangan negeri ini terjankit “syndrom negara gagal”, antara lain: keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, dan korupsi terus merajalela. Pada saat yang sama, legitimasi negara terus menurun, pemerintah tidak memiliki jalan keluar menghadapi berbagai problem di dalam negeri, dan tidak berdaya menghadapi tekanan dari luar. Faktor-faktor ini kemudian berubah menjadi problem psikologis, dan menjadi instrumen pemicu ledakan amuk massa. Amuk menggambarkan ledakan yang bersifat spontan. Faktor lain juga layak dipertimbangkan. Terdapat hipotesis, kelompok massa memang terlebih dulu dipersiapkan, kendati dalam waktu yang relatif terbatas, dan direncanakan secara tidak teratur, agar tetap terkesan spontan dan natural, dan dengan begitu semua jejak dapat disembunyikan.

Pada dasarnya hal yang paling penting mentaati sistem dalam berdemokrasi, namun sering kali masyarakat mengabaikannya, perilaku mengabaikan sistem tampaknya sering terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi lokal Indonesia. Pada kasus kekerasan Pilkada kabupaten Mojokerto, kelompok pendukung salah seorang calon telah mengabaikan aturan main demokrasi. Salah satu poin penting dalam demokrasi dalam menyelesaikan konflik kepentingan adalah jalur lobi negosiasi dan yudisial. Kelompok calon bupati bisa meminta proses negosiasi atau yudisial untuk memperjuangkan kepentingannya. Jika jalur lobi negosiasi dianggap tidak mampu menyelesaikan sengketa, jalur yudisial bisa dilakukan. Jika kasus kekerasan di Mojokerto dipicu oleh isu bakal calon yang tidak lulus verifikasi, kasus tersebut masuk sengketa proses Pilkada. Sengketa pemilu bisa diproses melalui lobi negosiasi

maupun proses yudisial dengan melibatkan pengawas pemilu. Namun, perilaku *disobedience to system*, tampaknya, telanjur akut. Karena itu, tindakan kekerasan menjadi pilihan yang dianggap paling rasional. Namun, pengabaian terhadap sistem dalam kehidupan berdemokrasi tidak hanya disebabkan euforia tafsir kebebasan. Pada konteks pelaksanaan demokrasi lokal tertentu, pengabaian terhadap sistem juga disebabkan masalah kepercayaan. Yaitu, kepercayaan terhadap berjalannya aturan main oleh penyelenggara wewenang dalam pemerintahan.

Jika dilihat pada kasus di Indonesia secara umum, khususnya tingkat daerah, penyakit kronis kelembagaan itu belum tersembuhkan. Karena itu, bisa dimaklumi kepercayaan publik terhadap penyelenggara wewenang pemerintahan sangat rendah. Termasuk pada kasus Mojokerto, pendukung calon bupati yang gagal masuk verifikasi mungkin tidak mempercayai penyelenggara KPU Mojokerto. Sebab, kenyataannya masih banyak pemberitaan mengenai penyakit kelembagaan KPU di berbagai daerah. Misalnya, kasus tentang pendataan daftar calon pemilih di Pilwali Surabaya yang bermasalah dan diduga bagian dari efek clientelisme. Ketidakpercayaan tersebut menciptakan *disobedience to system* yang diikuti aksi kekerasan. Fenomena ketidak patuhan ini dari berbagai kelompok kepentingan jelas tidak hanya terjadi di Mojokerto, namun juga merata di berbagai daerah Indonesia. Karena itu, kekerasan demi kekerasan masih membayangi demokrasi lokal.

Berdasar analisis ini, ada dua rekomendasi fundamen/dasar yang harus dilakukan dalam menangani masalah *disobedience to system* terkait pada proses Pilkada. Pertama, pemerintahan harus aktif melakukan pendidikan demokrasi sebagai upaya memupuk kesadaran mengenai kebebasan yang harus sadar kepada aturan main. Pada saat bersamaan, pemerintah harus mempersiapkan sistem keamanan yang kuat sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan aksi kekerasan dalam proses Pilkada. Kedua, pemerintah harus membenahi kelembagaan pemerintahan, dalam kasus ini KPU, sehingga meningkatkan kepercayaan publik untuk memercayai pelaksanaan aturan main yang sudah ada. Dua langkah tersebut paling tidak akan mereduksi surplus kekerasan tingkat lokal di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Ada beberapa penelitian yang ingin dicapai dalam proses Pemilukada sebagai berikut:

- Mendiskripsikan relasi kuasa antar kekuatan dalam Pemilukada di kabupaten Mojokerto.
- Mendeskripsikan kekuatan-kekuatan politik yang berperan pada Pilkada Mojokerto.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakan penelitian ini adalah agar dapat meningkatkan potensi mahasiswa dalam berpikir ilmiah, serta dapat mengkritisi permasalahan-permasalahan yang ada disekitar lingkungan kehidupan sosial politik pada masyarakat yang sedang terjadi. Sementara manfaat lainnya adalah untuk dapat mengetahui fenomena-fenomena pertarungan kekuatan-kekuatan politik di daerah indonesia dalam hal ini adalah kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah secara akademis adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Secara umum adalah interaksi dari kekuatan-kekuatan politik dan pertarungannya dalam hal ini di wilayah kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Konsep dan Teorisasi

Operasionalisasi Konsep

Kelompok Penekan (Pressure Group)

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Peran kelompok-kelompok penekan (pressure groups) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (pressure forces), tetapi juga kendali sosial (social control), pendidikan politik (political education) dan pembangunan kesadaran (awareness building aspect).

Jenis kelompok penekan (pressure group) di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi - paling tidak- tiga jenis kelompok penekan, berdasarkan gerak perjuangannya, yaitu :

- Bentuk perjuangan kelompok penekan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi dan sosial dan berbasiskan pada swadaya murni organisasi.
- Bentuk kelompok penekan yang mengemas kepentingan kelompok menjadi kepentingan-kepentingan penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi.
- Bentuk kelompok penekan yang tidak memiliki arah perjuangan yang konsisten, dan hanya bersifat berada dalam waktu yang temporer sehingga visi dan misinya secara praktis berubah-ubah.

Pilkada Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Langsung)

Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung merupakan bagian dari proses politik dimana terjadi pemilihan terhadap perseorangan untuk memimpin suatu pemerintahan daerah, dimana dalam pemilihan tersebut masyarakat dapat mempergunakan hak pilihnya secara langsung.

Pilkada yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2010.

Proses Demokrasi

Pemilukada adalah instrumen demokrasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara kelompok masyarakat tentang siapa yang harus dan layak menjadi kepala daerah. Pertarungan dalam proses Pilkada menjadi sebuah proses pertarungan politik dalam wujud tindakan demokrasi. Demokratisasi merupakan usaha untuk mencapai keputusan politik melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Menurut *Dahl* ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu dapat digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu: *pertama* seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan, dan *kedua*, seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.

Relasi Kekuasaan

Di dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu terdapat pengertian–pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan–keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan–tindakan pihak lain. Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin” (*direction*) atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah” (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguít disebut “pemerintah” (*gouvernants*) dan “yang diperintah” (*gouvernes*).

Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan–kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan–tindakan perlawanan dari orang–orang atau golongan–golongan tertentu.

Terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan, Max Weber membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu;

- a. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman pada warga.
- b. Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya, tipe ini di miliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.
- c. Kekuasaan rasional–legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.

Dalam hal ini membahas relasi kekuatan-kekuatan politik di Mojokerto. Relasi kuasa antar kekuatan yang dimaksud disini adalah para kandidat calon kepala daerah yang mengikuti kompetisi 5 tahunan dan para partai politik pendukung pada Pilkada di kabupaten Mojokerto. Para calon kepala daerah dan Parpol pendukungnya memiliki peran penting dalam Pilkada di kabupaten Mojokerto dan dari 3 pasangan calon kepala daerah ini memiliki relasi kuasa yang cukup kuat pada Pilkada.

Kerangka Pemikiran Teoritik

Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

Kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan-kepentingan antar individu. Sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terealisasi karena memiliki bargaining yang tinggi.

Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond adalah meliputi :

1. Kelompok Anomic ;

kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti, demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dll.

2. Kelompok Non Assosiasional ;

kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir dan kegiatannya bersifat temporer (kadangkala). Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga dan atau pemimpin agama.

3. Kelompok Institusional ;

kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya, Partai politik, korporasi bisnis, Badan legislatif, Militer, Birokrasi, dan lain-lain.

4. Kelompok Assosiasional ;

kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah Mustoffa Kamal Pasa – Choirunnisa (Manis). Pasangan dengan nomor urut 1 ini diusung tujuh parpol (PKB, PPP, PAN, PKS, PKPB, PBB dan Partai Patriot). Pasangan calon tersebut kemudian menjadi tim pemenang pada Pilkada Kabupaten Mojokerto.

Teori Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik berbeda dengan kelompok penekan (pressure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (interest group). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghundarkan keputusan yang merugikan.

Menurut Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partai-partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Sedangkan menurut R.H. Soltau : partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* juga mengemukakan definisi sebagai berikut : Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Teori Politik Lokal

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi yang baru pertama dilaksanakan sejak tahun 2005, pilkada juga merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, dari walikota, bupati hingga gubernur. Dalam pilkada kekuasaan politik yang terdesentralisasi dari pusat ke daerah, partai politik memiliki

peranan yang penting dalam mengakomodasi isu-isu politik yang menjadi kepedulian masyarakat.

Teori Weak strong society menjelaskan mengenai realita politik lokal di Indonesia pasca Orba yang sangat kuat dengan memenjarakan pikiran dan perilaku warga masyarakat, hak-hak politik warga terpasung dan dengan kejenuhan serta pemberontakan atas tekanan maka demonstrasi yang sangat besar pada tahun 1998 telah berhasil menumbangkan rezim Suharto. Demokrasi berjalan terus, kekuatan pusat beralih ke daerah dan kekuatan-kekuatan lain muncul di daerah dengan suasana yang hampir sama dengan suasana rezim Orba. Penguasa modal terus bergerilya untuk tetap eksis dalam pebisnisannya dan elit-elit serta aktor-aktor politik yang tidak jauh dari pengaruh penguasa.

Desentralisasi merupakan langkah penting dan langkah yang diperlukan untuk mengembangkan demokrasi lokal karena ia membuka ruang bagi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Pilkada merupakan bentuk terbaik bagi rekrutmen kepemimpinan di tingkat lokal dengan melibatkan rakyat sebagai penentu dan pemilik kedaulatan. Dalam pilkada, semua proses dan mekanisme penyelenggarannya harus benar, bersih dan jauh dari tekanan, rayuan dan kebohongan.

Relasi Kekuatan-kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Pilkada Mojokerto Tahun 2010

Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal ini, semua hal yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal cakupannya berada dibawah nasional. Golongan daerah yang termasuk dalam pengelolaan politik lokal diantaranya kota, kabupaten dan desa.

Pada taraf politik lokal, pemerintah nasional tidak dapat ikut campur secara penuh. Hal ini dikarenakan dalam setiap tatanan lokal telah mempunyai peraturan daerah masing-masing. Dalam hal ini, peraturan daerah biasanya tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Pelaksanaan politik lokal juga harus sejalan dengan politik nasional. Perbedaan tingkatan wilayah bukan berarti harus lepas dari tatanan wilayah nasional, namun politik lokal harus masih berkiblat kepada politik nasional.

Selain itu, politik lokal juga dapat diartikan sebagai pasar lokal yang menyediakan pelayanan publik. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa politik lokal dapat menjadi sebuah penyedia layanan publik yang baik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pada taraf lokal masyarakat akan lebih dapat dimengerti. Kebijakan-kebijakan pemerintah lokal pasti akan

menimbang dari sisi kehidupan masyarakat lokal secara mayoritas. Oleh karena itu, pemerintahan lokal dianggap sebagai penyedia layanan yang baik bagi masyarakatnya karena lebih dapat mengerti kebutuhan rakyatnya.

Selain itu, politik lokal akan lebih memperhatikan hak-hak rakyat kecil. Dalam hal ini karena pada tatanan lokal pasti akan lebih banyak rakyat yang miskin dari pada rakyat yang kaya. Hal ini dikarenakan pada politik lokal menggunakan pendekatan terhadap *grass-root* sehingga rakyat miskin akan menjadi sebuah perhatian. Padadarnya, jika menggunakan pendekatan akar rumput maka akan menemui masyarakat yang berada pada kemampuan ekonomi menengah kebawah. Hal ini dikarenakan pada taraf kehidupan masyarakat akar rumput hanya mementingkan isi perut. Ketika isi perut mereka tercukupi maka mereka akan terus hidup.

Tujuan politik otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara Pusat dengan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesatuan dapat direkatkan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Cita-cita ideal seperti ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Indonesia sendiri berpengalaman dalam menentukan corak desentralisasi dengan bermacam-macam undang-undang. Target dan capaiannya adalah penataan hubungan pemerintahan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Dennis Rondinelli (1981) mengatakan bahwa desentralisasi politik adalah peralihan kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur komando secara formal dari pemerintahan pusat. Dengan demikian, desentralisasi politik menyatakan bahwa konsep-konsep pemisahan, dari berbagai struktur dalam sistem politik secara keseluruhan. Pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan serta dianggap sebagai level terpisah yang tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pemerintah lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara hukum dan jelas di mana mereka (unit-unit tersebut) menerapkan wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsi publik.

Oleh sebab tujuan desentralisasi adalah untuk melakukan demokratisasi pemerintahan lokal, maka desentralisasi itu sendiri harus diterapkan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai hakiki demokrasi. Ini perlu digarisbawahi karena kenyataan kehidupan pemerintahan tidak jarang menunjukkan kenyataan, desentralisasi diterapkan dengan terlalu sering mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Kalau tidak begitu, proses demokratisasi di daerah

seringkali memperoleh hambatan justru dari pihak-pihak yang mengemban amanat desentralisasi itu sendiri.

Peta Kekuatan Partai Politik di Mojokerto

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten Mojokerto yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2010. Dari para calon yang mengikuti proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah membutuhkan kendaraan politik yaitu organisasi politik yang disebut partai politik yang mempunyai cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap pembuat kebijakan dalam pemerintahan dan melakukan langkah politik dalam proses kampanye pada pemilihan umum untuk kepentingan dukungan bagi para kandidat didalam menempati jabatan publik baik partai politik atau koalisi partai politik yang bergabung dengan partai politik lainnya, karena mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui pencalonan dari partai politik atau koalisi partai politik.

Peraturan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) didalam proses penyelenggaraannya diindonesia telah diatur didalam undang-undang sesuai dengan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dan didalam undang-undang pemerintah daerah mensyaratkan bahwa peserta Pilkada diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Sedangkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus memiliki minimal 15 % dari jumlah kursi DPRD tersebut dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD yang bersangkutan.

Pemilihan umum legislatif yang berlangsung pada 2009 di kabupaten Mojokerto mendapat antusiasme dari masyarakat. Pemilu legistlatif tahun 2009 dianggap lebihdemokratis dibanding dengan pemilu legislatif tahun 2004. Hal itu ditunjukkan oleh berubahnya beberapa aturan sistem pemilihan calon legislatif:

- (1) yang paling radikal adalah tidak lagi digunakannya nomor urut dalam menentukan seorang menjadi calon anggota legislatif,
- (2) adanya calon perempuan dalam setiap 3 nomor teratas, dan
- (3) sistem pemungutan suara yang murni terbuka.

Namun, bagi proses demokratisasi di Indonesia, sistem itu justru lebih merugikan. Karena partai politik sebagai salah satu perangkat demokrasi tidak lagi diberi kekuasaan untuk mengatur kadernya. Hal ini tentu akan memasung fungsi partai dalam membangun kondisi politik yang lebih baik. Persaingan untuk memperebutkan suara terbanyak bukan lagi menjadi tugas utama partai politik, tetapi lebih banyak dibebankan kepada kader partai secara individual. Hal ini berdampak pada proses liberalisasi politik yang mengedepankan kekuatan

modal / uang. Maka, calon yang paling dikenal atau populer akan memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan tertentu, meskipun calon tersebut berasal dari partai kecil, bahkan yang memiliki catatan buruk masa lalu sekalipun.

DiKabupaten Mojokerto, terdapat empat partai terbesar yang menguasai kursi DPRD yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kesatuan Bangsa (PKB), urutan partai ini sama dengan perolehan kursi di DPRD Jombang.

Berikut adalah pasangan calon Pilkada Mojokerto tahun 2010:

Tabel 3.6

Daftar Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Mojokerto 2010

No. 1	H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd
No. 2	Drs. Suwandi, MM dan H. Wahyudi Iswanto, SE, SH
No. 3	Khoirul Badik Dan A. Yazid Qohar

Sumber : KPUD Mojokerto tahun 2010

Dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati diatas ada salah satu pasangan incumbent yang memiliki peluang besar dalam memenangkan Pilkada Mojokerto yaitu pasangan Suwandi dan Wahyudi dengan dukungan dari GOLKAR, PDIP dan partai Demokrat. Pesaing Suwandi-Wahyudi yang disingkat Wasis adalah calon bupati Mustafa Kamal Pasa-Choirun Nisa' (Manis) yang diajukan koalisi tujuh parpol dan Choirul Badik-Yasid Qohhar (Khoko), calon independent.

Pada pasangan no. 1 Mustofa Kamal Pasa-Choirun Nisa' terdapat tujuh partai pendukung seperti PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB, dan Partai Patriot yang memiliki 21 kursi masing-masing, PKB memiliki 5 kursi, PPP (3), PKS (4), PBB (3), PAN (3),PKPB (2)dan Patriot 1 kursi. Dari 7 parpol pendukung Mustofa mempunyai modal suara dari Pemilu 2009 bila digabung sebesar 226.525 suara.Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah suara parpol pendukung Suwandi-Iswahyudi (Wasis) yaitu Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat ditambah Hanura total ada 223.977 suara. Sedangkan pesaing dari independen Choirul Badik mendapatkan dukungan sekitar 32.000 suara saat mendaftar ke KPU.

Dari tiga pasangan peserta Pilkada Mojokerto,ia memprediksikan yang mendapat suara antara 40% adalah pasangan Mustofa Kamal Pasa – Choirun Nisa (Manis) nomor urut

1, dan pasangan Suwandi – H Wahyudi Iswanto (Wasis) nomor urut 2. Sedangkan pada pasangan independen Khoirul – Qohar hanya mendapatkan 10 % (persen) saja.

Namun berdasarkan hasil penghitungan dari Desk Pilkada bahwa partai yang mendukung Mustafa seperti PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB, dan Partai Patriot memperoleh suara sebesar 387.743 suara (65,82 persen). Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah suara pada pasangan Suwandi-Iswahyudi (Wasis) sebesar 190.877 suara (32,40 persen) suara. Sedangkan pesaing dari independen Choirul Badik mendapatkan 10.484 suara atau 1,78 persen.

Dari jumlah pemilih tetap sebanyak 789.961 orang, Desk Pilkada mencatat tingkat partisipasi (ikut mencoblos) sebesar 77,18 persen, atau angka golput sekitar 20 % (persen). Jumlah surat suara sah sebanyak 589.104, sedangkan suara tidak sah sebanyak 20.571 surat suara. Dari data Tim Pemenangan Manis tersebut meraih 66 persen suara. Sedangkan pasangan Suwandi-Wahyudi Iswanto (Wasis) meraih 32,84 persen suara, dan pasangan Khoirul Badik-A Yazid Kohar (Khokoh) meraih 1,52 persen suara.

Kedua pasangan ini mampu meraih suara pemilih cukup banyak dalam Pilkada tahun 2010, karena kedua pasangan ini jauh sebelum dilaksanakan pentahapan Pilkada mereka terlihat semangat untuk mendekati masyarakat. Lebih-lebih dalam masa kampanye terbuka, kedua pasangan ini terlihat semakin giat mensosialisasikan visi misi mereka ke masyarakat sehingga membuat suara mereka terus bertambah. Terlebih lagi pada pasangan Mustofa-nisa memang terlihat jelas sangat mendominasi. Di TPS 01 Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, tempat calon bupati Suwandi mencoblos, pasangan Manis memperoleh 255 suara, sedang pasangan Wasis meraih 156 suara, dan pasangan Khoko 7 suara. Dari total 563 DPT, yang hadir 143 dan suara tidak sah mencapai 2 suara.

Kondisi ini berbeda jauh dengan TPS tempat Mustofa Kamal Pasha mencoblos. Di TPS 01 Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, dari jumlah DPT 436, pasangan Manis memperoleh 400 suara, pasangan Wasis 17 suara, dan pasangan Khoko tidak mendapatkan suara, serta suara tidak sah 2 suara, dengan tingkat kehadiran 419 suara. Demikian pula di TPS 7 Japan Raya, Kecamatan Sooko. Di TPS tempat calon wakil bupati Choirun Nisa mencoblos ini, pasangan Manis mendapat 215 suara, pasangan Wasis 80 suara, dan pasangan Khoko 15 suara, serta 146 golput.

Sedang di TPS 06 Kedungmaling, Kecamatan Sooko, tempat calon wakil bupati Wahyudi Iswanto mencoblos, perolehan suara pasangan Manis hanya kalah tipis dengan pasangan Wasis. Pasangan Manis mencapai 103 suara, pasangan Wasis 157 suara, dan pasangan Khoko 1 suara, dengan 2 suara tidak sah dan 87 pemilih tidak hadir.

Sementara pasangan Khoko menang telak di tempat Khoirul Badik mencoblos. Di TPS 05, Dusun Ngrambut, Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo ini, pasangan Manis meraih 50 suara, pasangan Wasis 34 suara, dan pasangan Khoko meraup 269 suara, dengan 3 suara tidak sah. Sedang di TPS 05 Dusun Jetis, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, tempat Calon wakil bupati A Yazid Kohar (Khoko) memilih, pasangan Manis menang dengan 225 suara, Wasis 65 suara, Khoko 18 suara.

Hal ini terbukti bahwa pasangan independen diprediksikan tidak bisa mengejar perolehan suara kedua pasangan rivalnya itu. Karena pasangan ini kurang intensif dalam memanfaatkan kampanye terbuka kemasyarakat.

“Ingat prediksi kita ini hanya berdasarkan hitungan diatas kertas, dan mengkaji dari perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) serta gerakan para peserta Pilkada selama mengikuti kampanye terbuka. Serta jika mesin parpol baik pengusung dan pendukung pasangan peserta Pilkada berjalan efektif dan maksimal,”

Prediksi menurut Drs. Suratman tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perhitungan ini hanya sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah dan tidak dijadikan patokan untuk hasil pilkada itu sendiri.

Sementara tiga tim calon pemenangan Pilkada Mojokerto sama-sama optimistis, jago mereka menang dalam Pilkada 2010. Mereka mengaku memiliki pendukung riil yang siap memberikan hak suaranya ke para calon-calon kepala daerah yang maju pada Pilkada. Seperti yang dikatakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Mustofa Kamal Pasa SE – Dra Hj Choirun Nisa M.Pd (Manis), mengatakan; optimistis jagonya akan unggul dalam Pilkada Mojokerto tahun 2010. Karena, jagonya diusung 7 parpol yang memiliki minimal 21 kursi di parlemen. Selain itu masih banyak parpol pendukung yang tak masuk parlemen juga memiliki basis massa riil siap memenangkan pasangan Manis.”

Selama masa kampanye tim pemenangan Manis dan calon pasangan Pilkada yang diunggulkan (Manis) memanfaatkan momen tersebut untuk mensosialisasikan visi misinya lima tahun kedepan ke masyarakat, dan ada pula tambahan dari kalangan PNS, masyarakat pun menyambut dengan positif. Dalam masa kampanye terbuka yang setiap pasangan mendapat 4 kali kesempatan, pasangan yang berinisial Manis ini hanya sekali menggelar panggung terbuka, yaitu pada saat penutupan kampanye di Lapangan Tambakagung. Sisanya, Mustofa memilih cara kampanye dialog tertutup dari desa ke desa untuk memaparkan visi dan misi ke masyarakat. Dalam tempo lima tahun sejak batal maju di Pilkada 2005, Mustofa juga sering memberikan bantuan ke masyarakat, baik sembako atau uang untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Ia juga mengunjungi tempat-tempat

ibadah. Namun bentuk kampanye yang dilakukan oleh Mustofa ini sangat aneh dan sempat memicu kontroversi, yakni ketika Mustofa bersujud di kaki warga serta menyerahkan wajahnya untuk dipukul warga di Desa Menanggal, Kec. Mojosari, Mojokerto.

Mustofa saat kampanye maupun bertemu dengan wartawan selalu menyampaikan keinginannya untuk menjadikan wilayah Kabupaten Mojokerto dibagi menjadi 5 wilayah, yakni Wilayah Barat, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. "Dengan kondisi ini, saya berharap pembangunan di Kabupaten Mojokerto bisa merata." katanya. Menurut pendapat Mustofa hal ini dapat diinterpretasikan bahwa visi misi yang dikampanyekan akan berjalan sesuai dengan pilihannya Mustofa untuk membangun kabupaten Mojokerto.

Sedangkan sikap optimis pun nampak pada pasangan, H Suwandi MM – H Wahyudi Iswanto SE SH (Wasis), bahwa pasangan Wasis berpeluang memenangkan Pilkada 2010 di Mojokerto. Hal ini dikarenakan, pasangan Wasis diusung tiga parpol besar, seperti PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat yang basis massa militan memiliki 19 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto, dan ditambah 3 kursi dari PKNU sebagai partai pendukung, sehingga jumlah kursi di DPRD menjadi 22 kursi. Selain itu juga ada lebih dari 8 parpol lain yang tak memperoleh kursi di DPRD bergabung dengan pasangan Wasis siap memenangkan incumbent ini. Hal ini yang menjadikan pasangan no urut 2 optimis akan memenangkan Pilkada di kabupaten Mojokerto. Suwandi adalah mantan bupati, yang melanjutkan kepemimpinan Achmadi ketika maju menjadi calon gubernur 2008 lalu. Saat Achmadi menjadi bupati, Suwandi menjabat wakil bupati. Sedangkan pasangannya, Wahyudi Iswanto, adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto.

Sementara pasangan Independen, Drs H.Khoirul Badik – Drs H Yasid Qohhar (Koko), juga optimistis memenangkan Pilkada ini. Menurut data dari KPUD Mojokerto pasangan independen ini memiliki massa yang riil dan memiliki lebih dari 32.368 suara. Khoirul Badik adalah guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Yazid adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari PKB.

Sementara dengan calon pasangan Pilkada yang gagal lolos KH Dimyati Rosyid (Gus Dim) – Drs H Karel, tetap mnyalurkan hak suaranya dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto, meskipun gugatannya terhadap KPU Kabupaten Mojokerto dan RSUD dr Soetomo ditolak Majelis Hakim PTUN di Sidoarjo.

Dibawah ini adalah tabel pasangan calon Pilkada di kabupaten Mojokerto 2010 dan parpol yang mendukung.

Tabel 3.7

Pasangan Calon PILKADA 2010	Parpol Pendukung
NO 1. H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE Dra. Hj. CHOIRUN NISA, M.Pd	Partai KEBANGKITAN BANGSA Partai KEADILAN SEJAHTERA Partai PERSATUAN PEMBANGUNAN Partai BULAN BINTANG Partai AMANAT NASIONAL Partai KARYA PEDULI BANGSA Partai PATRIOT
NO 2. Drs. SUWANDI, MM H. WAHYUDI ISWANTO, SE., SH	Partai GOLONGAN KARYA Partai DEMOKRASI PERJUANGAN Partai DEMOKRAT
NO 3. KHOIRUL BADIK A. YAZID QOHAR	PERSEORANGAN (INDEPENDEN)
DR. KH AHMAD DIMYATI ROSID, MA Drs. H. M. KAREL, MM (Pasangan lolos pendaftaran, namun gagal karena faktor kesehatan)	Partai KEBANGKITAN NASIONAL Partai GERAKAN INDONESIA RAYA Partai HATI NURANI RAKYAT Partai PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA Partai PEDULI RAKYAT NASIONAL Partai BARISAN NASIONAL Partai KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA Partai PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA Partai PERJUANGAN INDONESIA BARU Partai PERSATUAN DAERAH Partai PEMUDA INDONESIA Partai NASIONAL INDONESIA MARHAENISME Partai DEMOKRASI PEMBAHARUAN Partai REPUBLIKAN NUSANTARA Partai PELOPOR Partai DAMAI SEJAHTERA Partai NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA Partai BINTANG REFORMASI Partai INDONESIA SEJAHTERA Partai BURUH Partai MERDEKA

Relasi Kuasa Antar Kekuatan Pada Pilkada

Pemilukada sebagai sebuah proses demokratisasi sejatinya harus mampu menampung seluruh aspirasi rakyatnya. Ini juga diselenggarakan di kabupaten Mojokerto. Dengan diikuti

3 pasangan calon, pemilu pada ini mendapat cukup antusiasme dari masyarakat Mojokerto yang dibuktikan dengan minimnya hak pilih suara yang tidak dipakai sebesar 30,3% dari seluruh kecamatan di Mojokerto.

Pada relasi kuasa antar kekuatan pada Pilkada di Mojokerto sendiri dapat terlihat pada 3 pasangan calon dan juga pada Parpol pendukung. Pilkada tersebut diikuti oleh bupati incumbent (Drs. Suwanndi, MM) yang mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat. Namun sejarah awalnya, sebelum Choirunnisa menjadi wakil calon bupati Mustofa Kamal Pasa merekrut M Ali Kuncoro, namun hal ini menimbulkan polemik tersendiri pada pasangan ini. Pada awalnya tiga partai yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan bangsa menyerahkan rekomendasi dukungan namun dari tiga partai tersebut mengancam menarik dukungan dengan alasan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon wakil bupati. Selain itu, pasangan yang akan digandeng Mustofa ternyata tidak sama dengan rekomendasi dari ketiga partai pendukung yang notabene memiliki mayoritas kursi di DPRD.

Partai Demokrat yang pada saat itu memiliki lima kursi di parlemen mengaku merasa ditilap dan dikhianati. "Kalau pasangannya tetap seperti ini (Ali kuncoro), kami tidak bisa mendukung, dan, kami akan menarik dukungan," menurut Ketua DPC PD Kabupaten Mojokerto.

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa keputusan Partai Demokrat mengundurkan menjadi Parpol pendukung Mustofa yang terbaik karena Demokrat merasa dirinya dikhianati dikarenakan pasangan yang dicalonkan Mustofa tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati.

Langkah tersebut, menurut dari Partai Demokrat adalah yang tepat, hal ini juga untuk menyelamatkan harga diri dan kewibawaan partai. Pada awalnya, rekomendasi yang dikeluarkan DPP sudah menyebut berpasangan. Yaitu, Mustofa Kamal Pasa dan Sukarman (Kepala Dinas PU Kabupaten Mojokerto). Sementara pasangan yang dideklarasikan Cabup Mustofa Kemal Pasha bertentangan dengan rekomendasi Partai Demokrat.

Namun pada saat itu Partai Demokrat masih membuka kesempatan kepada Mustofa untuk memikirkan ulang keputusannya tersebut. Partai Demokrat bersedia akan menggelar pertemuan dengan Mustofa Kamal Pasa, Sukarman dan Ali Kuncoro. Namun, sikap politik yang akan ia ambil sudah sangat jelas, yakni jika tidak mengakomodir Sukarman sesuai rekomendasi yang ada, Partai Demokrat akan menarik dukungan.

Ancaman menarik dukungan dari koalisi partai politik pendukung Mustofa, juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar. Sejak awal, Partai Demokrat, Partai

Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar sudah bersepakat. Bahkan, rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa juga sudah menyebut berpasangan. Yakni, Mustofa Kamal Pasa dan Sukarman.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto mengatakan;“sejauh ini pihaknya masih mengurus rekom untuk Pilkada 2010. Memang, sesuai hasil rapat pleno dengan pengurus kecamatan (PK), tidak menyebut nama calon wakil bupati.”

Interpretasinya adalah bahwa Partai Golkar juga memiliki keputusan yang sama dengan Demokrat yang ingin mengundurkan menjadi Parpol pendukung apabila keputusan Mustofa memilih wakil bupati tidak sesuai rekomendasi yang telah disepakati.

Namun pada akhirnya PKB masih tetap menjadi partai pendukung Mustofa dikarenakan ia bagian dari pengurus NU (Ketua LPNU), dan juga ingin memperbaiki taraf hidup rakyat miskin, memperbaiki perekonomian dan pendidikan di kabupaten Mojokerto alasan ini yang membuat PKB tetap menjadi Parpol pendukung pasangan Manis. Kemudian yang menjadi calon wakil bupati adalah Choirunisa dan yang menjadikan alasan Mustofa memilih Choirunisa menjadi pasangan calon wakil bupati karena ia paham tentang birokrasi karena latar belakang Mustofa hanya seorang pengusaha sir-tu (pasir dan batu) di Mojokerto dan juga kiprahnya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa (guru), ia juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan bertanggungjawab, hal ini yang menjadikan ketertarikan Mustofa pada pasangannya calon Pilkadanya. Dengan keputusan Mustofa untuk yakin pada pasangan calon wakil bupati yang saat ini (Choirunisa), Partai Kebangkitan Bangsa pun masih tetap menjadi partai pendukung pasangan ini. Namun pada akhirnya partai Golongan Karya dan partai Demokrat menjadi partai pendukung no. 2 yaitu Suwandi dan Wahyudi.

Namun berbeda dengan Partai Keadilan Sosial yang merupakan partai pendukung Manis, alasan PKS melakukan kontrak politik dengan Mustofa merupakan hasil kajian yang sudah matang. Ada beberapa alasan terkait kontrak politik yang dilakukan PKS dengan Mustofa Kamal Pasa. Di antaranya untuk menghindari pengingkaran janji serta mengukur kinerja sang calon Bupati secara tertulis dan terukur. Namun menurut Ketua DPD PKS memiliki alasan lain; “Alasan kita memilih Pak Mustofa karena track recordnya baik, usianya masih muda dan satu visi dengan PKS yakni orangnya bersih, peduli dan profesional.”

Pendapat Ketua PKS dapat di interpretasikan bahwa alasan Parpol tersebut mendukung Mustofa karena sesuai dengan visi dan misi yang dikampanyekan dan sepak terjangnya sudah terlihat pada masa kampanye.

Kontrak politik yang dilakukan berisi 4 point diantaranya berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan siap memberantas KKN disegala bidang dengan

mengedepankan keteladanan. Berkomitmen membangun pemerintahan yang memberikan kepedulian kuat terhadap masyarakat kecil, dengan mengalokasikan APBD yang berorientas pemberdayaan masyarakat miskin, serta merealisasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Siap menyelenggarakan pemerintahan secara profesional dengan peningkatan PAD dari sektor non retribusi khususnya dari sektor perdagangan dan pendapatan BUMD dengan melakukan upaya perbaikan, penambahan dan peningkatan kinerja BUMD. Membuka peluang usaha seluas-luasnya untuk masuknya investasi di Kabupaten Mojokerto dengan memberikan kemudahan dalam proses perijinan dan memberikan jaminan keamanan usaha sehingga mempermudah investor yang akan menanamkan investasinya.

Sementara itu calon bupati Mustofa Kamal Pasa mengungkapkan dengan kontrak politik dirinya menjadi optimis saat maju dalam Pilkada mendatang. “Tujuan saya maju sebagai calon Bupati hanya untuk mengabdikan kepada masyarakat, kontrak politik apapun pasti saya berani teken dan siap saya lakukan kelak jika terpilih,”

Pernyataan Mustofa dapat diinterpretasikan bahwa dia benar-benar akan menyejahterakan masyarakat Mojokerto apabila terpilih menjadi bupati Mojokerto tahun 2010.

Kesimpulan

Dari analisis yang sudah dijelaskan dan diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai relasi kuasa antar kekuatan dalam Pemilu di kabupaten Mojokerto. Relasi kuasa antar kekuatan yang dimaksud disini adalah para calon kepala daerah yang mengikuti kompetisi 5 tahunan dan para partai politik pendukung pada Pilkada di kabupaten Mojokerto. Pada Pilkada yang dilaksanakan di kabupaten Mojokerto pada tanggal 7 juni 2010 tersebut terdapat 3 pasangan calon kepala daerah yang bersaing sangat kuat di dalam kompetisi ini, diantaranya; Mustofa kamal pasa-Choirun nisa (Manis), Suwandi-Wahyudi (Wasis) dan Khoirul badik-Qohar (Khoko). Dari 3 pasangan ini yang memilih independen hanya satu yaitu pasangan Khoko tapi tetap memiliki pengaruh besar pada Pilkada Mojokerto, sedangkan 2 pasangan yang lain memilih dukungan dari partai politik yang memiliki pengaruh jauh lebih besar. Namun hal ini tidak mempengaruhi sikapnya untuk menyerah, dari tiga tim calon pemenang Pilkada Mojokerto sama-sama optimis untuk memenangkan dalam Pilkada 2010. Mereka (3 pasangan calon Pilkada) mengaku memiliki pendukung riil yang siap memberikan hak suaranya ke para calon-calon kepala daerah yang maju pada Pilkada. Sikap ini yang menjadikan relasi/hubungan kuasa antar kekuatan dari 3 pasangan ini yang menjadikan sama-sama kuat.

Namun kekuatan pada pasangan calon Pilkada tidak luput dari peran partai politik yang mendukungnya, hal ini juga yang mempengaruhi kemenangan dari pasangan dalam Pilkada. Pada kabupaten Mojokerto, terdapat empat partai besar yang menguasai kursi DPRD yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kesatuan Bangsa (PKB). Dari empat partai besar tersebut dapat dilihat bahwa partai politik pendukung yang mendukung pasangan calon Pilkada pasti memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk memenangkan kompetisi 5 tahunan ini dan pastinya juga akan memiliki pengaruh dan kekuatan lebih besar pula. Pilkada di kabupaten Mojokerto tersebut tidak lepas dari peran incumbent yang salah satunya diikuti oleh bupati incumbent (Drs. Suwanndi, MM) yang mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat. Apabila dilihat dari dukungan partai politik pasangan Suwandi-wahyudi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan calon-calon rivalnya dan bakal dipastikan dapat memenangkan Pilkada di Mojokerto bagaimana tidak basis massa militan partai politik pendukungnya memiliki 19 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto, dan ditambah 3 kursi dari PKNU sebagai partai pendukung, sehingga jumlah kursi di DPRD menjadi 22 kursi. Tapi pada kenyataannya kekuatan incumbent hanya mendapatkan 32,84 persen saja, hasil ini berbeda dengan rivalnya Mustofa dan Choirunnisa yang mendominasi hasil perolehan suara yaitu 66 persen suara. Sedangkan pasangan Khoirul Badik-A Yazid Kohar (Khokoh) meraih 1,52 persen suara. Dengan hasil ini terbukti bahwa peran incumbent pada Pilkada di kabupaten Mojokerto tidak lagi mendapatkan antusias dari masyarakat dan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua calon incumbent memiliki kekuatan lebih di dalam memenangkan Pilkada.

Di dalam relasi kuasa antar 3 kekuatan calon pasangan Pilkada ini yang paling menonjol adalah pasangan Mustofa kamal pasa dan Choirunnisa, pasangan dengan sebutan Manis ini mendapatkan hasil suara yang cukup mendominasi dalam Pilkada kabupaten Mojokerto. Hasil ini juga karena dukungan dari partai politik antara lain; PKB, PKS, PPP, PBB, PAN, PKPB dan Partai Patriot. Namun sebenarnya Mustofa didukung oleh P.Demokrat dan P.Golkar, karena dengan alasan Mustofa telah mengecewakan 2 parpol ini Demokrat dan Golkar mengundurkan diri sebagai Parpol pendukung pasangan no.1 ini Masyarakat pun menyambut positif dengan hasil suara Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan Manis. Kemenangan Manis pun tak luput dari proses kampanye yang memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya hal ini terlihat dalam masa kampanye terbuka yang setiap pasangan mendapat 4 kali kesempatan, pasangan Mustofa dan Choirunnisa ini hanya sekali menggelar panggung terbuka, yaitu pada saat penutupan kampanye. Sisanya, Mustofa memilih cara kampanye

dialog tertutup dari desa ke desa untuk memaparkan visi dan misi ke masyarakat. Mustofa juga sering memberikan bantuan ke masyarakat, baik sembako atau uang untuk meringankan beban penderitaan orang lain dan juga mengunjungi tempat-tempat ibadah. Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih pasangan Manis dan layak untuk menjadi bupati Mojokerto karena dalam cara penyampaian visi dan misinya membangun kabupaten Mojokerto untuk jauh lebih baik, maju dan masyarakat lebih sejahtera, visi misi ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat.

Mustofa sendiri memiliki relasi kuasa yang cukup kuat disamping ia sebagai pengusaha sir-tu juga menjabat sebagai ketua LPNU (Lembaga Perekonomian NU) kabupaten Mojokerto. Dapat diambil kesimpulan dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh mustofa tersebut banyak mempengaruhi kemenangan pada Pilkada Mojokerto karena massa militan terbesar di kabupaten Mojokerto adalah NU secara otomatis masyarakat pun lebih banyak memilih pasangan Mustofa dan Choirunnisa. Di samping Mustofa kamal pasa yang menjabat sebagai ketua LPNU, suami Choirunnisa memiliki peran penting dalam organisasi islam tersebut yaitu ketua PCNU di kabupaten Mojokerto.

Saran

Dari penjelasan dan uraian diatas diharapkan dapat dirumuskan beberapa saran yang nantinya mampu menjadi referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa dalam melihat relasi kuasa antar kekuatan politik lokal khususnya pada Pilkada di kabupaten Mojokerto.

Bagi calon-calon kepala daerah khususnya pada pasangan Mustofa dan Choirunnisa yang sekarang telah menjadi bupati Mojokerto, haruslah konsekuen dengan jani-janji yang ditawarkan pada saat kampanye karena hal ini akan mempengaruhi antusias masyarakat pada Pilkada selanjutnya. Pada PCNU juga jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengundurkan dukungannya pada pasangan Manis terutama pada tokoh-tokoh yang berpengaruh pada organisasi islam ini yaitu para Kyai. Kyai seharusnya lbh bijak dalam menghadapi masalah yang ada, bukan akhirnya bersikap emosional. Pada dasarnya NU bukan milik kyai saja, melainkan umatnya juga. Hal ini yang menjadi peninjauan khusus dalam menyikapi suatu masalah.

Kajian yang menarik pada penelitian ini adalah peneliti dapat mengerti pengaruh-pengaruh relasi kuasa antara 3 pasangan calon Pilkada beserta partai-partai politik pendukungnya yang sama-sama kuat pada Pilkada di kabupaten Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul (ed.). 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Alfian,(1992).*Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*,Jakarta: Gramedia
- Budiarjo, Miriam,(1977).*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Bugin Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*, edisi pertama, Surabaya: Airlangga University Press.
- Judge, Timothy A dan Stephen P.Robins,(2008).*Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba empat
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan,(2006).*Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, Jakarta: Gramedia
- Marsh, David dan Gerry Stoker,(2010).*Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Bandung; Nusa Media.
- Miles dan Huberman,(1992).*Analisa Data Kualitatif*,Jakarta: UI press.
- Macridis, Roy C, (1988).*Pengantar Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-partai*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Nurhasim, Moch. *Konflik Antar Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Sugiyono,(2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta.
- Surbakti, A. Ramlan, (1992).*Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Soemardjan, Dr Selo, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Suzzane keller, Jakarta: Rajawali.
- Silalahi oberlin, (1989). *Beberapa Aspek Kebijakanaksanaan Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Varma, S.P, (2001).*Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuwono K.Andi, Kusnadi J. Raymond, Blegur Sinnal, (2010).*Bersatu Membangun Kuasa Pengembangan Strategi Gerakan Rakyat Pasca Politik Elektoral 2009*,Perkumpulan Praxis, Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat.

Jurnal

International Crisis Group, *Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah*, Asia Report No.197 – 8 Desember 2010.

Rahman, A., *Kelompok Kepentingan (Interest Group)*, Sistem Politik Indonesia (Pusat Pengembangan Bahan Ajar – UMB)

Wahyudi, Sarjana Sigit, *Demokrasi di Tingkat Lokal*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang.

Skripsi

Tyas Nila, 2008, " *Konfigurasi Peta Kekuatan Politik Tuban*", Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

KM, Pasek Trisna D. A, 2009, " *Dinamika Kekuatan Politik Lokal*", Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

<http://www.surya.co.id/2011/12/14/nu-mojokerto-boikot-bupati-mkp>
<http://tomtomtomo.blogspot.com/2011/01/politik-lokal.html>
<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=119332>
<http://iklankotaonline.com/2011/10/12/perempuan-di-ranah-publik-dra-hj-choirun-nisa-m-pd/>
<http://www.harianbhirawa.co.id/legislatif/3256-tiga-parpol-ancam-tarik-dukungan-ke-mustofa>
<http://www.tempo.co/read/news/2010/01/07/058217878/Musda-Golkar-Kabupaten-Mojokerto-Berlangsung-Panas-dan-Deadlock>
http://politik.vivanews.com/news/read/156518-pengusaha_mustofa_jadi_bupati_mojokerto
<http://www.mojokertokab.go.id/mjk/src/default.php>
<http://bataviase.co.id/node/344948>
<http://koranbaru.com/tag/puri/>
<http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=8f71dcdf43f4ac0f51a751ddcac943&jenis=b706835de79a2b4e80506f582af3676a>
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2011-07-16/106260/Inilah_Alasan_Kinerja_Bupati_Mojokerto_Belum_Sesuai_Visi_Misi
<http://swaramajapahit.wordpress.com/2010/03/19/h-mustofa-kamal-pasa-bacabup-mojokerto-diganjal-golkar-tetap-maju-bersama-7-partai>